



Kepala OPD Kota Pontianak Berganti



SUARA PEMRED/KRISTIAWAN BALASA

DILANTIK - Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Pontianak, Mahmudah melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintahan Kota Pontianak, di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (12/4) siang.

PONTIANAK, SP - Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Pontianak, Mahmudah melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintahan Kota Pontianak, di Aula

Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (12/4) siang. Dia menyebutkan pengangkatan dan pemindahan ini sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun

• Baca Halaman 15



Hal 9 ■ **kepala opd**

2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Jadi sesuai dengan ketentuan dari Mendagri, saya selaku Pjs Wali Kota sudah meminta izin kepada Mendagri untuk melakukan pelantikan. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan persetujuan dari Mendagri untuk melantik,” ucapnya.

Penempatan pejabat yang dilantik merupakan hasil seleksi. Pemkot membuka open bidding dan job fit dan dilaksanakan sesuai aturan. Di mana kewenangan ini dilakukan Wali Kota Pontianak, Sutarmidji sehingga dirinya tinggal melantik saja. Sebelum Sutarmidji cuti pilkada, proses sudah dilaksanakan dan sudah terpilih pejabat-pejabat yang menduduki jabatan tersebut.

Sejumlah jabatan di Pemerintah Kota Pontianak memang sudah beberapa lama mengalami kekosongan. Meski memang sudah ditunjuk Pelaksana Tugas. Dengan dilantik para pejabat pimpinan tinggi pratama, dia berharap kinerja yang sudah baik makin baik.

“Kita ingin program-program yang sudah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik karena ini sudah diisi dengan pejabat yang definitif,” ucapnya.

Para pejabat yang menempati posisi baru itu sebelum mengikuti serangkaian tes kompetensi. Mahmudah pun berpesan kepada mereka yang baru dilantik. Dia mengingatkan pentingnya pengelolaan arsip agar arsip daerah dapat terkelola dengan baik. Apalagi Pontianak saat ini merupakan salah satu barometer bagi daerah lain di Indonesia, hanya di Kalimantan barat.

Mahmudah juga mengingatkan, kedudukan menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil pada jabatan fungsional tertentu dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Pada hakikatnya, jabatan teknis sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi pemerintah namun tidak tercantum dalam struktur organisasi.

“Untuk itu tingkatkan terus mutu, prestasi serta produktivitas kerja,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, dia berpesan kepada asisten administrasi umum dan asisten perekonomian dan pembangunan, agar dapat membantu sekretaris daerah dalam melakukan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan perumusan kebijakan baik di bidang umum, administrasi pembangunan, perekonomian, perlengkapan dan aset, maupun hubungan masyarakat dan protokol yang sesuai dengan bidangnya.

Sementara pada staf ahli, dia minta sering melakukan kajian dan telaah tentang bidang tugasnya, baik itu pemerintahan, hukum dan politik keuangan maupun pembangunan. Permasalahan-permasalahan yang muncul dikarenakan penerapan suatu aturan atau peraturan perundang-undangan perlu segera dikaji. Dia juga ingin koordinasi antara para staf ahli dan kepala perangkat daerah baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja

yang optimal.

Untuk sejumlah Kepala OPD, pesan Mahmudah terutama untuk Kepala Inspektorat. Dia ingin Pontianak bisa mempertahankan predikat WTP dan meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap PNS maupun urusan ketatausahaan. Jika perlu dilakukan pengusutan, pemeriksaan dan pengujian. Untuk kepala BKPSDM, dia mau layanan kepegawaian dapat terus ditingkatkan, dan dilakukan pengembangan-pengembangan menuju profesionalisme.

“Profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah merupakan keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi,” pungkasnya.

Sementara itu, Plt Sekda Kota Pontianak, Uray Indra mengatakan sebenarnya pejabat yang sekarang dilantik sudah sangat terbiasa dengan koordinasi. Mereka juga berkompeten dengan tugas ke depan.

“Saya pikir mereka tinggal menyesuaikan, kalau belajar tidak perlu lagi karena mereka sudah paham. Tinggal menyesuaikan, begitu menempati pos itu mereka menyesuaikan tinggal jalan,” ucapnya.

Dia pun menegaskan dalam menempati jabatan baru itu, sebagaimana yang biasa dilakukan Pemerintah Kota Pontianak, ada pengukuran kinerja dan serangkaian tes.

“Penempatan pasti sesuai kompetensi masing-masing karena ada uji kompetensi,” pungkasnya.

Berdasarkan surat keputusan Nomor: 821.2.22/85/BKPSDM-M/2018 tanggal 11 April 2018, sejumlah nama eselon II menempati posisi baru. **(bls/bob)**